

## **ARTIKEL**

# **EVALUASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS ELECTRONIC GOVERNMENT DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) KABUPATEN WONOSOBO**

**Amalia, Santoso, Rihandoyo**

**Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Diponegoro**

**JL. Prof. Soedarto, SH Tembalang**

## **ABSTRAKSI**

SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) merupakan sebuah sistem yang terpadu meliputi pendataan pegawai, pengolahan data, prosedur, tata kerja, sumber daya manusia dan teknologi informasi untuk menghasilkan informasi yang cepat, lengkap dan akurat dalam administrasi kepegawaian. Mengacu pada Inpres No 3 Tahun 2003 dan adanya pengertian SIMPEG tersebut maka BKD Wonosobo sebagai badan yang mengelola manajerial kepegawain juga menerapkan SIMPEG untuk membantu dalam proses pengelolaan dan pengolahan data secara lebih efektif dan efisien. Adapun SIMPEG di BKD Wonosobo diwujudkan dalam empat aplikasi dimana masing-masing aplikasi tersebut mempunyai fungsi masing-masing.

Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan bagaimana kinerja SIMPEG di BKD Wonsobo beserta faktor pendorong dan penghambatnya untuk bisa mengetahui kesesuaian fakta yang ada dilapangan dengan pedoman yang seharusnya sehingga dapat diambil sebuah rekomendasi bagi kemajuan SIMPEG di masa yang selanjutnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, untuk menjelaskan fenomena yang terjadi mengenai kinerja penerapan SIMPEG diberbagai aplikasi yang ada di BKD Wonosobo dengan berpedoman pada Inpres No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government serta berbagai teori

konsep untuk memperkuat serta menambah pustaka. Dari hasil penelitian masih menunjukkan bahwa empat aplikasi yang ada belum sepenuhnya sesuai dengan penerapan SIMPEG yang semestinya. Hal ini terutama dapat terjadi karena masih rendahnya komitmen dan dukungan pemimpin serta SKPD yang lain serta masih terbatasnya SDM di BKD sendiri untuk dapat mengoperasionalkan aplikasi tersebut.

**Keyword :** SIMPEG, e-Government, komitmen dan dukungan, pemimpin, SKPD, SDM

## **A. PENDAHULUAN**

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan yaitu Bagaimana kinerja Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian berbasis e-Government di BKD Kabupaten Wonosobo ? dan Apa saja faktor pendorong dan penghambat penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian berbasis e-government di BKD Kabupaten Wonosobo. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di BKD Kabupaten Wonosobo serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di BKD Kabupaten Wonosobo.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan narasumber dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo. Adapun analisis data yang digunakan dimulai dari analisis domain yaitu dengan memperoleh gambaran yang menyeluruh secara umum mengenai penerapan SIMPEG di BKD Wonosobo dengan menggunakan tabel tematis, kemudian menggunakan analisis taksonomi dimana pada analisis ini lebih memfokuskan mengenai kinerja penerapan SIMPEG serta faktor pendorong dan penghambatnya, kemudian menggunakan analisis tema kultural yaitu mengkaitkan dengan pedoman penerapan e-government. Adapun pedoman yang digunakan penulis adalah tujuh indikator keberhasilan e-government yang disadur dari Reformasi Birokrasi Lembaga Administrasi Negara serta adanya analisis

yang terakhir yaitu analisis tema kultural. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam melakukan proses evaluasi.

## **B. PEMBAHASAN**

Adapun tujuh indikator yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan evaluasi penerapan SIMPEG yang terdiri dari empat aplikasi yaitu aplikasi pengadaan CPNS, aplikasi kenaikan pangkat, aplikasi pensiun dan aplikasi mutasi adalah sebagai berikut:

1. Dorongan penerapan e-Government
2. Komitmen dan dukungan pemimpin serta SKPD yang lain di Kabupaten Wonosobo
3. Aspek pendanaan
4. SDM dan budaya kerja
5. Aksesibilitas masyarakat pengguna
6. Manajemen e-government dan pengelolaan sistem
7. Konsep pengembangan infrastruktur e-government

Dari ketujuh indikator tersebut dengan mengkaitkan setiap aplikasi yang terintegrasi dalam SIMPEG di BKD Wonosobo serta berpedoman pada Inpres No.3 Tahun 2003 dan berbagai macam konsep teori. Maka dapat diketahui bahwa penerapan SIMPEG di setiap aplikasi yang ada di BKD Wonosobo adalah sebagai berikut:

### **1. Aplikasi Pengadaan CPNS**

Berdasarkan ke-tujuh indikator diatas dan mengacu pada Inpres No 3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government dan berbagai konsep teori serta menyadur dari media maka aplikasi ini dapat dikatakan **Kurang Baik**. hal ini dikarenakan karena dari tujuh indikator yang sesuai dengan pedoman yang seharusnya hanya

terdapat pada indikator SDM dan budaya kerja serta indikator manajemen dan pengelolaan sistem.

## 2. Aplikasi Kenaikan Pangkat

Pada aplikasi ini dapat dikatakan **Cukup Baik** karena dari ketujuh indikator tersebut tiga diantaranya sudah sesuai yaitu dapat dilihat pada indikator dorongan penerapan e-government, aksesibilitas masyarakat, dan pengembangan infrastruktur.

## 3. Aplikasi Pensiun

Tidak berbeda dengan aplikasi kenaikan pangkat, pada aplikasi pensiun ini juga dapat dikatakan **Cukup Baik** hal ini dapat dilihat dengan adanya kesesuaian pada indikator dorongan penerapan e-government, SDM dan budaya kerja, aksesibilitas masyarakat penggunaserta manajemen dan pengelolaan e-government.

## 4. Aplikasi Mutasi

Aplikasi ini merupakan aplikasi terakhir yang terintegrasi dalam SIMPEG di BKD Wonosobo dimana pada aplikasi ini juga dapat dikatakan **Cukup Baik**. hal ini dapat dilihat dari ketujuh indikator, sudah ada kesesuaian pada indikator dorongan penerapan e-government, komitmen dan dukungan pemimpin, SDM dan budaya kerja, aksesibilitas masyarakat pengguna serta pengembangan infrastruktur e-government.

Adapun faktor pendorong dan penghambatnya adalah sebagai berikut:

### 1. Aplikasi pengadaan CPNS

Faktor pendorong pada aplikasi pengadaan CPNS ini adalah selain untuk mempermudah proses dalam pengolahan data pendaftar pengadaan CPNS juga adanya jumlah hardware yang memadai merupakan faktor pendorong dari aplikasi ini. Karena pendaftar CPNS yang jumlahnya mencapai ribuan akan membutuhkan waktu yang sangat lama jika dilakukan secara manual. Sedangkan untuk faktor penghambat dalam aplikasi ini selain adanya keterbatasan hardware belum ditemukan kendala lain karena aplikasi ini belum dapat digunakan.

## 2. Aplikasi kenaikan pangkat

Dorongan penerapan SIMPEG pada aplikasi kenaikan pangkat adalah adanya proses yang dilakukan menjadi lebih cepat sehingga efektif dan efisiensi kerja menjadi dapat lebih tercapai seperti untuk entry data pegawai yang akan melakukan kenaikan pangkat menjadi lebih cepat tetapi hal tersebut juga harus didukung dengan jumlah hardware yang sesuai dan pengajuan berkas ke BKD yang tepat waktu tetapi hal tersebut nampaknya belum bisa diwujudkan pada aplikasi ini yang sekaligus menjadi faktor penghambat karena diketahui bahwa pengajuan berkas dari SKPD yang sering berada pada akhir jatuh tempo serta masih terbatasnya jumlah hardware yang ada.

## 3. Aplikasi pensiun

Faktor pendorong dan penghambat aplikasi ini secara general tidak jauh berbeda dengan aplikasi kenaikan pangkat yaitu adanya hal yang mendorong penerapan aplikasi pensiun ini adalah untuk mempercepat proses sedangkan kendala yang dihadapi dari aplikasi mutasi ini adalah koneksi dari pusat yang kadang masih terhambat.

## 4. Aplikasi mutasi

Dorongan penerapan pada aplikasi ini adalah adanya pemutakhiran data dan pegawai sehingga data yang disajikan juga akurat, selain itu pegawai yang terlibat dalam mutasi pegawai diharapkan dapat memperoleh pengalaman kerja yang lebih yang bermanfaat untuk karir kedepannya. Adapun faktor penghambat dalam aplikasi mutasi ini berdasarkan hasil wawancara diketahui tidak ada kendala berarti yang ditemui dalam penerapannya.

## **C. PENUTUP**

Untuk menunjang keberhasilan penerapan SIMPEG di BKD Wonosobo berikut rekomendasi yang dapat diberikan:

1. Melakukan pendekatan persuasif dan pemahaman yang lebih kepada unsur pimpinan tentang pentingnya e-government di Kabupaten Wonosobo.  
Pendekatan dan pemahaman ini dapat dilakukan baik oleh kepala BKD Wonosobo maupun perwakilan dari eksekutif pada saat rapat penetapan APBD. Dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah dan Kepala DPPKAD. Pendekatan yang dilakukakan secara kontinyu dan sifatnya mengajak kepada panitia anggaran selaku lembaga yang berhak memutuskan besarnya anggaran di Kabupaten Wonosobo ini diharapkan dapat membuat suatu pemahaman dan pandangan yang cenderung lebih terbuka bahwa penerapan e-government merupakan hal yang penting dalam membantu mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta mewujudkan adanya transparansi publik.
2. Menyediakan weblog atau website yang update mengenai informasi kepegawaian oleh BKD Wonosobo secara langsung.  
Ini dimaksudkan agar berita mengenai kepegawaian dapat langsung diketahui oleh masyarakat dan langsung bersumber dari pihak BKD sendiri. Bukan dari portal wonosobo lagi. Oleh karena itu juga harus diperhatikan dan dipersiapkan SDM yang menguasai dalam bidang ini sehingga tidak seperti yang sudah-sudah website BKD tidak dikelola dengan baik sehingga jarang sekali update berita. Dengan adanya weblog atau website nanti diharapkan masyarakat dapat lebih mengetahui dan BKD sendiri sebagai badan yang mengelola manajemen kepegawaian juga lebih terbuka mengenai hal-hal yang menyangkut tentang kepegawaian.
3. Menjadwalkan tenggat waktu pengumpulan data lebih awal dari waktu yang ditentukan. Didalam aplikasi kenaikan pangkat ini pengiriman data-data kepegawaian khususnya mengenai data pensiunan dari SKPD lain di Kabupaten Wonosobo sering tertunda-tunda akibat iklim budaya menunda-nunda, untuk itu dari pihak BKD menjadwalkan tanggal pengumpulan berkas yang lebih awal dari sebelum penjadwalan dari BKN sebagai antisipasi.
4. Mengusulkan Pembuatan regulasi mengenai implementasi SIMPEG berbasis e-Government di Kabupaten Wonosobo sehingga dengan adanya regulasi

tersebut diharapkan mampu menjadikan penerapan SIMPEG berbasis e-Government sebagai salah satu prioritas anggaran APBD Kabupaten Wonosobo sehingga mampu meningkatkan pengadaan hardware dan sarana penunjang implementasi SIMPEG berbasis e-Government.

5. Meningkatkan jaringan akses internet di BKD Wonosobo sehingga mampu mengatasi permasalahan lambatnya koneksi langsung ke BKN sebagai server pusat pengiriman data pegawai.